



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025



(0274) 367509 ext 845
dkp@bantulkab.go.id
dkp.bantulkab.go.id
dkp_bantul



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 31 Januari 2026


Kepala,
Istriyani, S.Pi, MM
NIP. 196802271996032003

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021 – 2026, Perjanjian Kinerja 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap satu Indikator sebagai berikut :

Sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan masyarakat diukur dengan indikator Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan (meta indikator : Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n dikurangi Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun $n-1$ dibagi Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun $n-1$ dikali 100 persen). Target tahun 2025 sebesar 1,91% Terealisasi sebesar 2,01% dengan prosentase capaian sebesar 105,24 %.

Berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap dua Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan Produktivitas Hasil Perikanan

Diukur dengan indikator PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB target tahun 2025 sebesar Rp.197.160.000.000,- tercapai sebesar Rp 207.351.540.000,- prosentase realisasi sebesar 105,17%. Tujuan meningkatkan produktivitas hasil perikanan diidukung dengan 1 Sasaran, yaitu meningkatnya produksi hasil perikanan

2. Sasaran 1 : Meningkatkan produksi hasil perikanan

- Diukur dengan indikator Pertumbuhan produksi sektor perikanan (meta indikator : Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n dikurangi Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun $n-1$ dibagi Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun $n-1$

dikali 100 persen). Target tahun 2025 sebesar 1,91% Terealisasi sebesar 2,01% dengan prosentase capaian sebesar 105,24%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim
3. Pengendalian hama dan penyakit ikan
4. Regenerasi pelaku usaha perikanan
5. Pengembangan pakan alternatif
6. Penggunaan teknologi perikanan
7. Peningkatan konsumsi makan ikan
8. Pengawasan usaha perikanan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD	3
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis	5
F. Cascading Kinerja	8
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	8
BAB II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
1. Tujuan dan Sasaran	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
B.1 Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan	22
B.2 Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan	23
B.2.1 Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan	24
C. Akuntabilitas Anggaran	34
D. Efisiensi Sumber Daya	35
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	35
F. Lintas Sektor	36
BAB IV Penutup	40

Daftar Tabel

Tabel I. 1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	5
Tabel I. 2. Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan	6
Tabel II. 1.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026 .	12
Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029 .	13
Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Renstra Periode 2021-2026	14
Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026	15
Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029	15
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra	16
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra	17
Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	18
Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	18
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	21
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan	22
Tabel III. 4 PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	23
Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan	23
Tabel III. 6 Pertumbuhan produksi sektor perikanan	24
Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	
Tabel III. 8 IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	26
Tabel III. 9 IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	26
Tabel III. 10 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025	34

Tabel III. 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	35
Tabel III. 12 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	35
Tabel III. 13 Program dan Kegiatan Pendukung Pengarustamaan Gender.....	36
Tabel III. 14 Inventarisasi lintas Sektoral	37

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DKP Kab. Bantul	4
Gambar 1. 2 Skema Kinerja DKP Kab. Bantul	8
 Gambar 2. 1 Aplikasi SAKIP	 19
 Gambar 3. 1 Realisasi dan capain IKU	 25
Gambar 3. 2 Target dari IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	28

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan tahun 2025 yang telah dimandatkan oleh Bupati Bantul. Sebagai pemberi mandat, Bupati dapat merujuk kepada LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2025.

B. Pembentukan OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk pada Tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Dinas Kelautan dan Perikanan digabung ke dalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menjadi Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul kembali membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, yang didalamnya memuat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan Dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

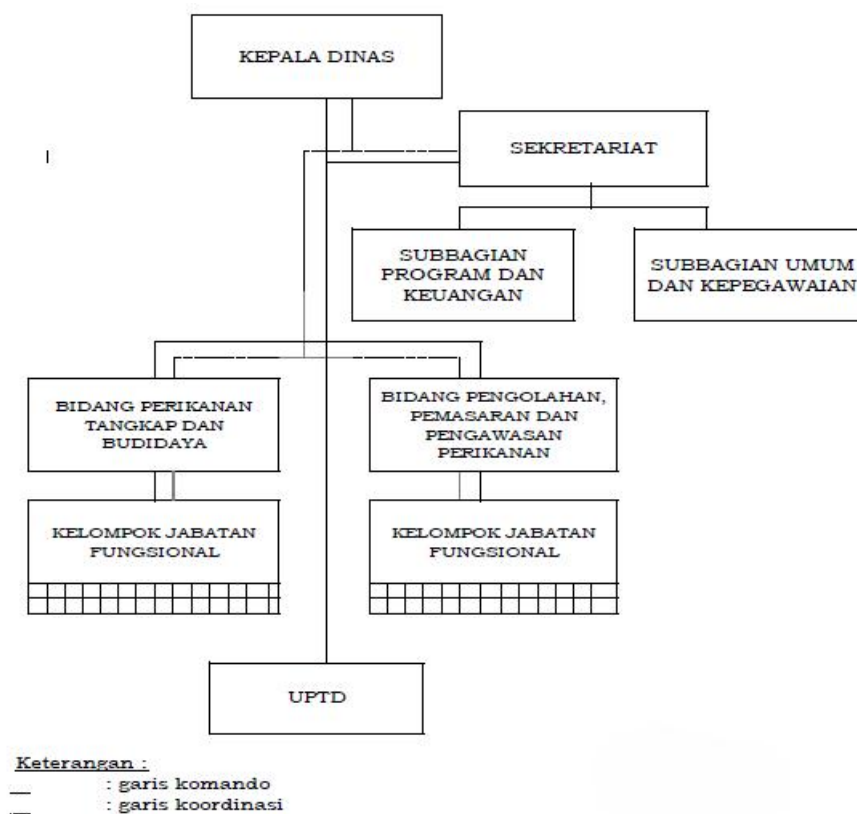
C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. UPTD

Struktur organisasi DKP dapat dilihat pada Gambar 1.:



Gambar 1. 1Struktur Organisasi DKP Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP Kabupaten Bantul. Dukungan

sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1					1
	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	4					4	4				2	2
	2. Pengawas	3					3	1	2			1	2
	3. Pelaksana	30					16		4	4	8	9	7
	Jabatan Fungsional	11					9	2	7			4	5
	Jumlah	49					33	8	13	4	8	16	17

Sumber: Data DKP Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang (39,40%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (24,24%), SMA 8 orang (24,24%), D3 sebanyak 4 orang (12,12%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 16 orang, terdiri dari 12 orang pejabat pelaksana substantif dan 4 pejabat pelaksana administratif. Tidak terdapat pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, dan juga tidak terdapat pegawai yang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

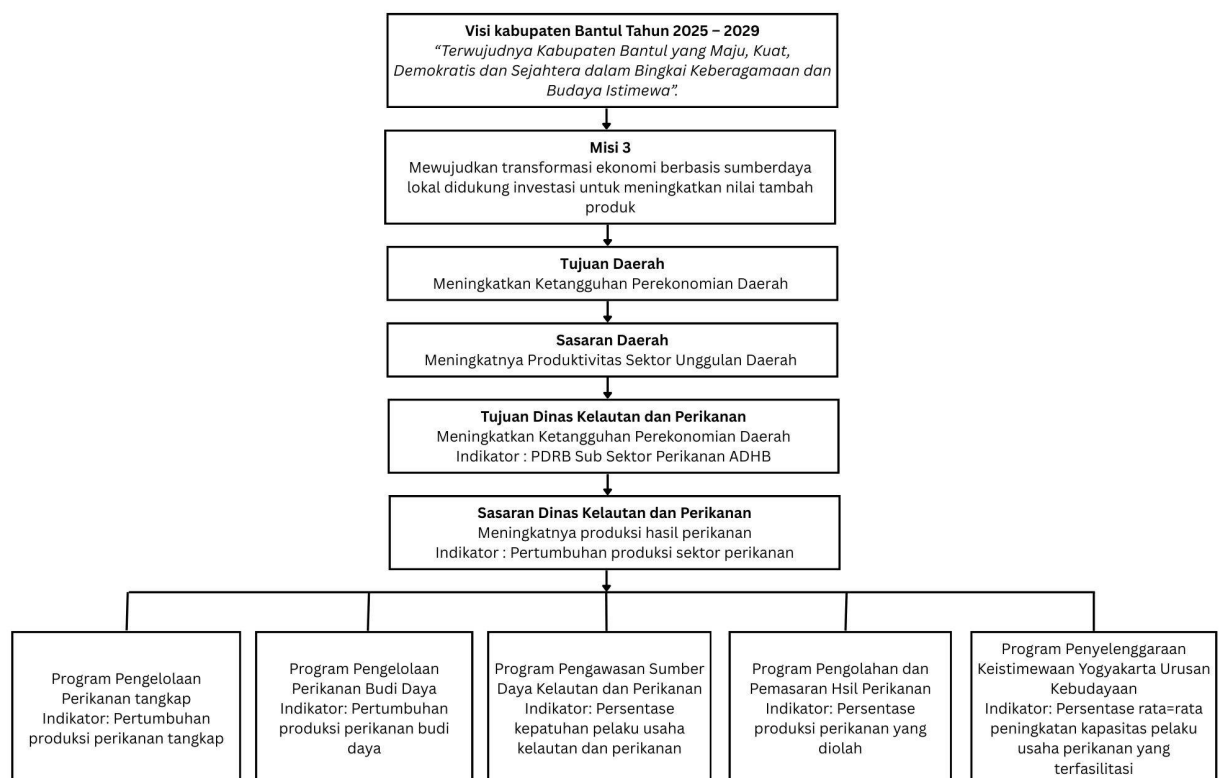
Tabel I. 2. Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	Adanya alih fungsi lahan;	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang	1. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	1. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pengembangan kawasan selatan DIY	Belum optimalnya pemanfaatan ruang pesisir untuk ekonomi biru berkelanjutan
	Adanya perubahan iklim;	2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana	2. Kesadaran aksi global terkait climate action	2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2. Perkembangan teknologi informasi	Kebutuhan penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat/stakeholder dalam pembangunan kelautan dan perikanan
	Kurangnya minat generasi muda pada usaha kelautan (perikanan tangkap);	3. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	3. Revolusi industri 4.0	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 4. Pengembangan kawasan selatan DIY	Perlunya regenerasi dan peningkatan minat wirausaha para pemuda pada sektor kelautan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
	Teknologi perikanan yang kurang optimal;	4. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	4. Menghadapi revolusi industri 5.0	4. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	4. Perkembangan teknologi informasi 5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Belum optimalnya teknologi perikanan yang digunakan
	Kurangnya budaya konsumsi ikan;	5. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	5. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	5. Upaya pemajuan kebudayaan	Angka Konsumsi Ikan (AKI) masih rendah
	Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.	6. Belum optimalnya perlindungan terhadap Gumuk Pasir	6. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	6. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Kualitas lingkungan hidup 7. Penurunan kualitas dan kuantitas air 8. Penurunan kualitas tutupan dan lahan 9. Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	konservasi ekosistem pesisir dan pengembangan ekowisata berkelanjutan
	Belum optimalnya kemitraan dan jejaring pemasaran	7. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	7. Menghadapi Revolusi Industri 5.0	7. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	7. Percepatan penanggulangan kemiskinan	Penguatan sistem distribusi dan pemasaran hasil perikanan

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Skema Kinerja DKP Kab. Bantul

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0474.B/EV.SAKIP/2025 tanggal 24 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Agar melakukan analisis kembali terhadap indikator kalurahan bahari yang direvitalisasi dan berkoordinasi dengan Bagjan Organisasi dan Bappeda Kabupaten Bantul.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Indikator kalurahan bahari yang direvitalisasi sudah dianalisis dan dikoordinasikan dengan Bagjan Organisasi dan Bappeda Kabupaten Bantul.

c) Bukti Dukung :

Hasil analisis dan koordinasi tersebut termuat dalam dokumen perencanaan (RENSTRA 2025-2029, RENJA 2026) dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pada indikator Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yaitu kalurahan bahari yang direvitalisasi menjadi Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi.

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan penyempurnaan kualitas penetapan target kinerja.

c) Bukti Dukung :

Pada program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, indikator pada RENSTRA perubahan Tahun 2021-2026 adalah tercapainya penurunan jumlah pelanggaran aturan, formulasi ini bersifat invert di mana capaian pelanggaran semakin kecil maka semakin baik. Sementara itu Inspektorat menghendaki konsistensi formulasi kualitas penetapan target kinerja. Oleh karena itu pada RENSTRA Tahun 2025-2029 indikator program tersebut berubah menjadi Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Hal ini selaras dengan penyempurnaan kualitas penetapan target kinerja. Bukti dokumen berada pada RENSTRA Tahun 2025-2029.

Rekomendasi 3 :

a) Rekomendasi

Menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat Regional Provinsi DIY maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja pemerintah.

b) Tindaklanjut Rekomendasi

Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat Regional Provinsi DIY maupun secara nasional

c) Bukti Dukung

Dokumen yang menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat Regional Provinsi DIY maupun secara nasional terdapat pada LKJ (Laporan Kinerja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung misi yang ke-3 , yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-3, yaitu Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan produktivitas hasil perikanan. Sedangkan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan adalah meningkatnya produksi hasil perikanan dengan indikator sasaran Pertumbuhan produksi sektor perikanan.

Tabel II. 1.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika				
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sasaran/IKU
MISI 3	Terwujudnya	Terpenuhinya	Pertumbuhan	
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	pemerataan pendapatan	kebutuhan perikanan masyarakat	produksi sektor perikanan	

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD periode 2021 – 2026 adalah

Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. MISI 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	PDRB Sektor Pertanian ADHB

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatkan Pengeolaan Perikanan Tangkap	• Peningkatan kompetensi dan jumlah nelayan • Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan • Peningkatan Kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama
		Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	• Peningkatan kompetensi dan jumlah pembudidaya ikan • Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan • Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pembudidaya ikan
		Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan	• Peningkatan komptensi dan jumlah personal pengawas usaha Perikanan • Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan
		Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	• Peningkatan kompetensi dan jumlah pengolah dan pemasar ikan • Peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan • Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	T1: Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini (angka)
2	S1: Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi sektor perikanan

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026

Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	T1: Meningkatkan produktivitas hasil perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB
2	S1: Meningkatnya produksi hasil perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	1,92	I	-
					I	-
					III	-
					IV	1,92 *

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	575.000.000
	Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD)	1.566.147.020
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD)	2.659.222.168
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	435.428.000
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (APBD)	875.543.936
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	6.760.808.359
	Jumlah	12.872.149.483

Pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan revaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Revaluasi dilakukan karena adanya perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 dan telah ditetapkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan produktivitas hasil perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Miliar Rupiah	197,16	I	197,16
					I	197,16
					III	197,16
					IV	197,16 *
2..	Sasaran : Meningkatnya produksi hasil perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	1,91	I	1,91
					I	1,91
					III	1,91
					IV	1,91*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	396,500,000.00
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD)	1.463.348.770
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD)	2.662.351.918
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	416.977.600
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (APBD)	855.303.836
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	7.087.549.913
	Jumlah	12.882.032.037

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

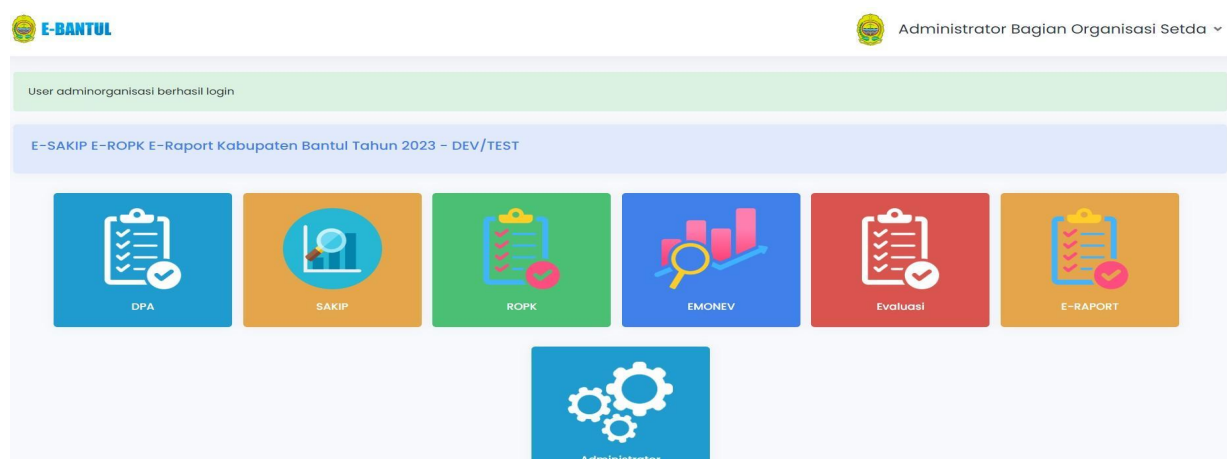
No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sumber : Renstra tahun 2025-2029



D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.bantulkab.go.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar 2. 1 Aplikasi SAKIP

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.



Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tujuan : Meningkatkan produktivitas hasil perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	189,29	197,16	207,35	105,17%	207,63	99,86%
2	Sasaran : Meningkatnya produksi hasil perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	1,88	1,91	2,01	105,24%	1,94	103,60%

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1 Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu sasaran dengan indikator sasaran adalah pertumbuhan produksi sektor perikanan. Berdasarkan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026, hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel III.4, disimpulkan bahwa capaian kinerja DKP berdasarkan realisasi capaian IKU di tahun 2025 adalah sebesar 341,82% termasuk pada kriteria Sangat Tinggi.

Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan produksi sektor perikanan (%)	1,88	0,6	2,01	335%	0,65	309,23%

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0,6%, realisasi sebesar 2,01% tercapai 335% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 1,88 atau tercapai sebesar 313,33%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,13%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,65%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 309,23% dari target akhir Renstra tahun 2026.



B.2. Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu tujuan yaitu meningkatkan produktivitas hasil perikanan. Indikator tujuan ini adalah PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB (Rp Miliar). Berdasarkan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029, target tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel III.4.

Tabel III. 4 PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB

TP: Meningkatkan produktivitas hasil perikanan								
Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Rp Miliar	189,29	197,16	207,63	218,09	228,56	239,02	249,48

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2026

Berdasarkan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029, hasil pengukuran kinerja pada tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersaji pada Tabel III.5, disimpulkan bahwa capaian kinerja DKP berdasarkan realisasi capaian IKU di tahun 2025 adalah sebesar 96,00% termasuk pada kriteria Sangat Tinggi.

Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB (Rp Miliar)	189,29	197,16	207,35	105,17%	207,63	99,86%

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 197,16, realisasi sebesar 207,35, tercapai 105,17% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 189,29 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 cenderung statis. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 207,63. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,86% dari target akhir Renstra tahun 2026. Formulasi dari indikator ini adalah Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik.

B.2.1 Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu sasaran yaitu meningkatnya produksi hasil perikanan. Indikator tujuan ini adalah pertumbuhan produksi sektor perikanan. Berdasarkan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029, target sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan tersaji pada tabel III.6.

Tabel III. 6 Pertumbuhan produksi sektor perikanan

SP: Meningkatnya produksi hasil perikanan								
Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1,88	1,91	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2026

Berdasarkan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029, hasil pengukuran kinerja pada sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersaji pada Tabel III.7, disimpulkan bahwa capaian kinerja DKP berdasarkan realisasi capaian IKU di tahun 2025 adalah sebesar 105,24% termasuk pada kriteria Sangat Tinggi.

Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan produksi sektor perikanan (%)	1,88	1,91	2,01	105,24%	1,94	103,60%

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

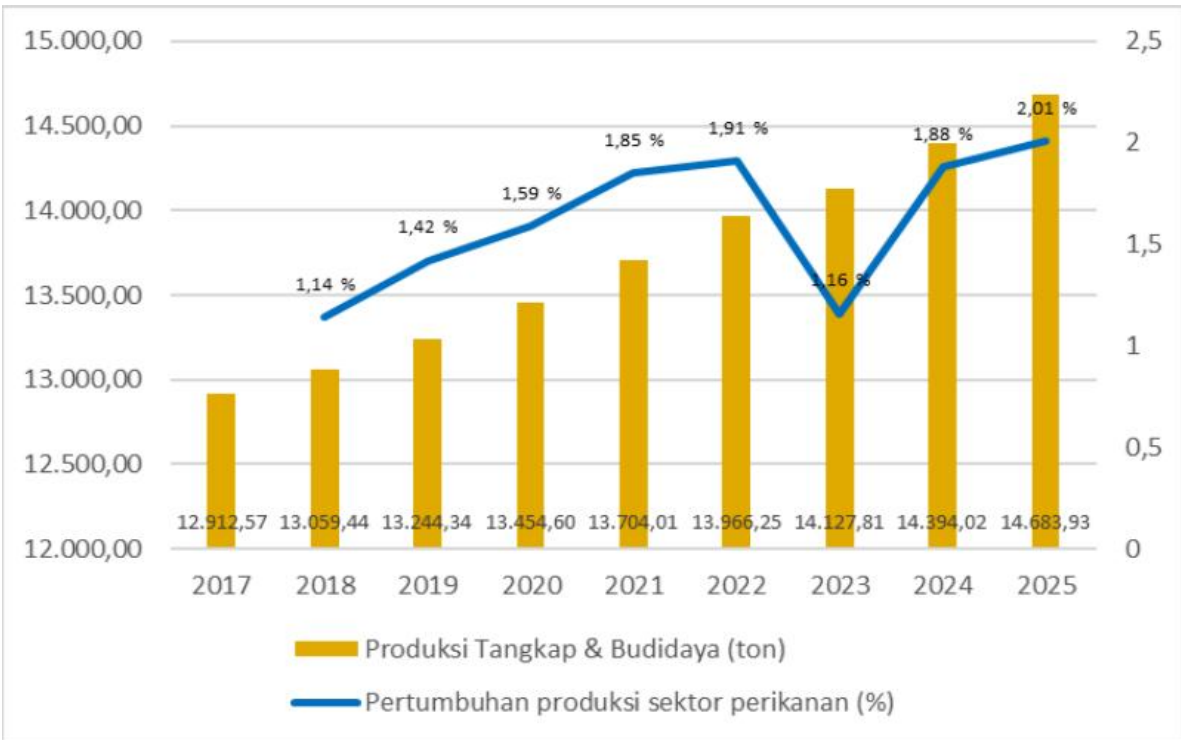
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 1,91, realisasi sebesar 2,01% tercapai 105,24% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 1,88 atau tercapai sebesar 106,91%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,13%. Formulasi pada indikator ini adalah Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n dikurangi Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n-1 dibagi Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan



budidaya) tahun n-1 dikali 100 persen. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n (2025) sebesar 14.683,93 ton dan Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n-1 (2024) sebesar 14.394,02 ton. Selisih produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 289,92 ton, sehingga jika dibagi produksi tahun 2024 sebesar 14.394,02 ton dan dikali 100% menjadi 2,01%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 1,94%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 103,6% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Capaian sasaran DKP berdasarkan data 9 tahun menunjukkan adanya tren capaian positif dan selalu memenuhi capaian target. Namun demikian capaian IKU di tahun 2023 memperlihatkan adanya penurunan bila dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022. Capaian IKU pada tahun 2024 kembali meningkat dan menunjukkan tren positif kembali. Realisasi dan capain dari kedua IKU di atas ditampilkan pada grafik berikut :



Gambar 3. 1 Realisasi dan capain Sasaran DKP

Akuntabilitas kinerja selain target dibandingkan realisasi, dapat dilakukan pula dikomparasikan dengan target dan realisasi dari DKP DI. Yogyakarta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berikut merupakan tabel yang realisasi

dan capaian baik tujuan maupun sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

Tabel III. 8 Realisasi dan Capaian Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah) <u>Meta Indikator :</u> PDRB Perikanan = $\sum$ (Volume Produksi x Harga Dasar Tahun 2010 <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Volume produksi: jumlah atau kuantitas fisik dari komoditas perikanan yang dihasilkan selama periode tertentu (komoditas perikanan tangkap dan perikanan budidaya.	351.670 juta rupiah	371.350 juta rupiah	371.350 juta rupiah**	100,00% (371.350 juta rupiah /371.350 juta rupiah x 100%)	378.714 juta rupiah	98,05% (371.350 juta rupiah / 378.714 juta rupiah x 100%)

Tabel III. 9 Realisasi dan Capaian Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah) <u>Meta Indikator :</u> Nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun n, dalam juta rupiah <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Total produksi dikalikan harga rata-rata penjualan ikan dalam satu tahun.	2.745.013 juta rupiah	2.421.104 juta rupiah	2.735.686 juta rupiah (nilai produksi perikanan budidaya Rp2.543.917,5 juta + realisasi produksi perikanan tangkap Rp191.768 juta.)	112,99 % (2.735.686 juta rupiah / 2.421.104 juta rupiah x 100%)	2.669.267 juta rupiah	102,49 % (2.735.686 juta rupiah / 2.669.267 juta rupiah x 100%)

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki tujuan Nilai Subsektor Perikanan PDRB DIY (ADHK) sebesar Rp 371.350.000.000 (371,350 milyar rupiah), sementara itu Kabupaten Bantul memiliki nilai PDRB subsektor perikanan ADHB sebesar Rp 207.351.540.000 (207,35 milyar rupiah*). Berdasarkan data di atas nilai PDRB subsektor ADHB Kabupaten Bantul adalah 55,83% dari PDRB subsektor perikanan DIY. Tingkat ketercapaian IKU Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah sebesar 100% sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebesar 96% dari target.

Ditinjau dari capaian Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya, Provinsi DIY memperoleh capaian sebesar Rp 2.735.686.000.000 (2,735 triliun rupiah), atau tercapai 112,99% dari target. Sementara itu, IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menetapkan target produksi sektor perikanan tahun 2025 sebesar 1,91% dengan capaian sebesar 2,01%. Sehingga baik di tingkat Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY, IKU produksi perikanan tangkap dan budidaya sama-sama melampaui target.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan juga dikomparasikan dengan target dan realisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berikut merupakan gambar yang memuat target dari IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2025.



Gambar 3. 2 Capaian Indikator Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Perbandingan capaian indikator Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2025 diuraikan sebagai berikut. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki capaian PDB perikanan sebesar Rp. 610.750.000.000.000 (610,75 triliun rupiah) sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memiliki capaian PDRB subsektor perikanan ADHB

sebesar Rp 207.351.540.000 (207,351 milyar rupiah), angka capaian ini menyumbang 0,03% dari capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ditinjau dari segi volume produksi ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki capaian 26,26 juta ton, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memiliki capaian 13,79 ribu ton. Pada angka ini saya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berkontribusi sebesar 0,0005% dari capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan analisa data dan komparasi yang sudah disampaikan, faktor pendorong keberhasilan tercapainya IKU Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 antara lain :

Faktor pendorong :

1. Adanya anggaran APBD Pelatihan pelatihan budidaya ikan lokal komoditas unggulan sebanyak 44 pokdakan dan pelatihan ikan hias sebanyak 5 pokdakan.
2. Adanya pelatihan operasi kapal penangkap ikan *double engine* (jalur II)
3. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil melalui anggaran BKK Kalurahan Dana Keistimewaan.
4. Komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder terkait.
5. Pengendalian internal Dinas Kelautan dan Perikanan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu pada rencana operasional pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang.

Langkah strategis ke depan untuk mengoptimalkan IKU Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan Meningkatnya produksi hasil perikanan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim
3. Pengendalian hama dan penyakit ikan
4. Regenerasi pelaku usaha perikanan
5. Pengembangan pakan alternatif
6. Penggunaan teknologi perikanan

7. Peningkatan konsumsi makan ikan

8. Pengawasan usaha perikanan

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai sebesar 100%. Formulasi pada indikator ini adalah Jumlah peserta yang meningkat produksi atau pendapatannya setelah diberikan fasilitasi, dibagi total jumlah peserta dikali 100%. Program ini didukung kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potesi Budaya. Aktifitas pada program ini antara lain pengembangan workshop pembengkelan kasko perahu dan pengembangan workshop pembengkelan mesin perahu.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada tahun 2025 menargetkan sebesar 0,61% tercapai sebesar 0,96%. Formula pada indikator ini adalah Jumlah total produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi Jumlah total produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi Jumlah total produksi perikanan tangkap tahun n-1 dikali 100%. Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar 850,72 ton dan pada tahun 2025 produksi perikanan tangkap meningkat sebesar 8,16 ton, sehingga pada tahun 2025 tercatat sebesar 858,88 ton. Berdasarkan formulasi di atas tercapai 0,96%. Terdapat selisih dengan target sebesar 0,35%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



- e. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - f. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 menargetkan sebesar 2,02% tercapai sebesar 2,08%. Formula pada indikator ini adalah Jumlah total produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi Jumlah total produksi perikanan budidaya tahun $n-1$ dibagi Jumlah total produksi perikanan budidaya tahun $n-1$ dikali 100%. Pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya sebesar 13.543,295 ton dan pada tahun 2025 produksi perikanan budidaya meningkat sebesar 281.756 ton, sehingga pada tahun 2025 tercatat sebesar 13.825,051 ton. Sehingga berdasarkan formulasi di atas tercapai 2,08%. Terdapat selisih dengan target sebesar 0,06%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 52% tercapai sebesar 52,17%. Formulasi pada indikator ini adalah jumlah pelaku usaha yang patuh dibagi jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa (jenis komponen pelaku usaha kelautan dan perikanan) dikali 100%. Jumlah pelaku usaha yang diperiksa pada tahun 2025 adalah sebanyak 46 pelaku usaha. Jumlah pelaku usaha yang masih terdapat pelanggaran sebanyak 22 terdiri atas 4 pada pelaku usaha perikanan tangkap (perairan umum) dan 18 pada pelaku perikanan budidaya. Sehingga jumlah pelaku usaha yang sudah patuh terhadap komponen pengawasan adalah sebanyak 24 pelaku usaha. Berdasarkan

fomulasi di atas dapat diperoleh persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan pada tahun 2025 addalah sebesar 52,17% atau terdapat selisih 0,17% dari target yang sudah ditetapkan. Program ini didukung kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

5. Program Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator persentase produksi perikanan yang diolah pada tahun 2025 menargetkan sebesar 3,88% tercapai sebesar 3,89%. Formulasi pada indikator program ini adalah Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah dibagi jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dikali 100%. Jumlah produksi ikan yang diolah pada tahun 2025 adalah sebesar 571,69 ton, sedangkan total jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) adalah sebesar 14.683,931 ton. Berdasarkan formulasi di atas diperoleh persentase produksi perikanan yang diolah sebesar 3,89% atau terdapat selisih sebesar 0,01% dari target yang ditetapkan. Program ini didukung kegiatan antara lain:

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. GAPURA SAMUDRA

GAPURA SAMUDRA merupakan inovasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang berfokus pada penguatan tata kelola sektor kelautan dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan. Inovasi ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, nelayan, dan masyarakat pesisir dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, serta daya saing sektor kelautan dan perikanan. Melalui pendekatan layanan terpadu, pendampingan, dan pemanfaatan potensi lokal, GAPURA SAMUDRA



mendorong pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan sekaligus berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bantul.

2. TRAJUMASTRA (Kemitraan Maju Masyarakat Perikanan Sejahtera)

Inovasi TRAJUMASTRA (Kemitraan Maju Masyarakat Perikanan Sejahtera) merupakan inisiatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perikanan. Melalui pendekatan kolaboratif, TRAJUMASTRA mendorong peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan, akses permodalan, teknologi, serta pemasaran hasil perikanan. Inovasi ini bertujuan mewujudkan usaha perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kabupaten Bantul.

3. SOHIB (Sentra Olahan Hasil Ikan Bantul)

SOHIB (Sentra Olahan Hasil Ikan Bantul) merupakan inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertujuan memperkuat daya saing sektor perikanan melalui pengembangan hilirisasi produk dan penguatan model bisnis pelaku usaha perikanan. Inovasi ini menghadirkan pendampingan terpadu mulai dari peningkatan kualitas produksi, pengolahan hasil perikanan bernilai tambah, hingga akses pemasaran dan kemitraan usaha. Melalui SOHIB, diharapkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya meningkat serta sektor kelautan dan perikanan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.

D. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.882.032.037,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp12.327.899.159,00, atau sebesar 95,69%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III. 10 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Rp5.794.482.124,00	44,99
Jumlah		Rp5.794.482.124,00	44,99
Belanja Pendukung		Rp7.087.549.913,00	55,01
Total Belanja		Rp12.882.032.037,00	100

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.794.482.124,00 atau sebesar 44,99% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp7.087.549.913,00 atau sebesar 55,01% dari total belanja.

Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp3.974.943.368,00 teralisasi sebesar 90,91 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,69% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang



terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 45,83%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 54,16%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	197,16 milyar rupiah	207,35 milyar rupiah	105,17	12.882.032.037	12.327.899.159	95,69%
2	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	1,91 persen	2,01 persen	105,24			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

E. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,31% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 44,99%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 55,01%.

Tabel III. 12 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan/Pertumbuhan produksi sektor perikanan	5.794.482.124	5.650.523.278	143.958.846	2,48%
Jumlah					
Belanja Pendukung		7.087.549.913	6.677.375.881	410.174.032	5,79%
Total Belanja		12.882.032.037	12.327.899.159	554.132.878	4,31%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

F. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Analisis program dan kegiatan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, guna memastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara. Dinas Kelautan dan Perikanan turut serta dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender terutama dalam peltihan kelautan dan perikanan. Berikut ini adalah program dan kegiatan terkait dengan pengarusutmaan gender

Tabel III. 13 Program dan Kegiatan Pendukung Pengarusutamaan Gender

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

G. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai berikut:



Tabel III. 14 Inventarisasi lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN BANTUL	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	melaksanakan koordinasi, penyusunan dan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.	SURAT EDARAN Nomor: B/500.5.4/010 57/DKP TENTANG GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN (GEMARIKAN)	ASN (PNS dan PPPK) dan masyarakat yang bertugas pada OPD di Kabupaten Bantul : Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan diharapkan dapat mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kabupaten Bantul untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	melaksanakan koordinasi, penyusunan dan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	melaksanakan koordinasi, penyusunan dan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan			

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.			
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	melaksanakan koordinasi, penyusunan dan perumusan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas SDM dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.			
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	melaksanakan koordinasi, penyusunan dan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	melaksanakan koordinasi, penyusunan dan perumusan kegiatan serta melakukan			



No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.			
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	melaksanakan koordinasi, penyusunan dan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.			
		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan daerah sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah dan perekonomian regional.			

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan capaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Terdapat satu sasaran dengan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni, dan satu tujuan serta satu sasaran dengan dua IKU dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 105,17% dan 105,24% dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Adanya anggaran APBD Pelatihan pelatihan budidaya ikan lokal komoditas unggulan sebanyak 44 pokdakan dan pelatihan ikan hias sebanyak 5 pokdakan.
2. Adanya pelatihan operasi kapal penangkap ikan *double engine* (jalur II)
3. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil melalui anggaran BKK Kalurahan Dana Keistimewaan.
4. Komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder terkait.
5. Pengendalian internal Dinas Kelautan dan Perikanan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu pada rencana operasional pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang.



Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim
3. Pengendalian hama dan penyakit ikan
4. Regenerasi pelaku usaha perikanan
5. Pengembangan pakan alternatif
6. Penggunaan teknologi perikanan
7. Peningkatan konsumsi makan ikan
8. Pengawasan usaha perikanan

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN



Rencana Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65

ပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1,92	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1,92*

Keterangan :

- Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Rp 575.000.000
	Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD)	Rp 1.566.147.020
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD)	Rp 2.659.222.168
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	Rp 435.428.000
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (APBD)	Rp 875.543.936
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	Rp 6.760.808.359
	Jumlah Anggaran	Rp 12.872.149.483

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



ISTRIYANI, S.PI., MM.
NIP. 19680227 199603 2 003



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN II
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Perikanan dan kelautan dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi biru. Peningkatan produksi perikanan sangat beralasan karena potensi pasar sangat terbuka lebar, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peranan ikan sebagai sumber protein hewani makin penting dalam komposisi makanan masyarakat.

Sasaran “Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat” mengandung pengertian bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di kelautan dan perikanan memiliki tugas membantu Bupati dalam mewujudkan pencapaian Misi “Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Tingkat pertumbuhan sektor perikanan merupakan salah satu upaya mencapai ketahanan pangan, menanggulangi kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun ini dikurangi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dibagi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dikali 100% Tahun dasar : Tahun n-1	Olah data Dinas Kelautan dan Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan produksi sektor perikanan	1,92 %	Target sebesar 1,92% yang ditetapkan menunjukan bahwa angka pertumbuhan produksi sektor perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul diharapkan mengalami pertumbuhan sebesar 1,92% dibandingkan dengan angka pertumbuhan di tahun dasar (tahun n-1). Berdasarkan hasil olah data angka pertumbuhan produksi sektor perikanan, persentase pertumbuhan produksi sektor perikanan pada tahun 2024 sebesar 1,88%. Rincian data realisasi produksi perikanan tangkap dengan total 850,72 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 13.543,30 ton sehingga diperoleh jumlah total 14.394,02 ton. Sedangkan target produksi pada tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		2024 berdasarkan dokumen perubahan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebesar 13.771 ton dengan rincian target produksi tangkap 833 ton dan target produksi perikanan budidaya 12.878 ton. Trend capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP yaitu pertumbuhan produksi sektor perikanan pada tahun 2028, 2029, 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah 1,14%, 1,42%, 1,59%, 1,85%, 1,91%, 1,16%. Sedangkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yaitu produksi perikanan sebesar 24,58 juta ton.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ

Telp: (0274)367509 ext 845 | Website:dkp.bantul.kab.go.id |
E-Mail : dkp@bantulkab.go.id

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan produktivitas hasil perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Miliar Rupiah	197,16	I	197,16
					II	197,16
					III	197,16
					IV	197,16*
2	Sasaran : Meningkatnya produksi hasil perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1,91	I	1,91
					II	1,91
					III	1,91
					IV	1,91*

Keterangan :

- Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran	
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	396,500,000.00
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD)	Rp	1.463.348.770
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD)	Rp	2.662.351.918
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	Rp	416.977.600
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (APBD)	Rp	855.303.836
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	Rp	7.087.549.913
Jumlah Anggaran		Rp	12.882.032.037

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



ISTRIYANI, S.PI., MM.
NIP. 19680227 199603 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



LAMPIRAN II
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Tujuan/Sasaran :

Yang dimaksud Sasaran kinerja meningkatnya produksi hasil perikanan adalah bahwasannya peningkatan produksi perikanan sangat beralasan karena potensi pasar sangat terbuka lebar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi usaha perikanan mulai dari hulu ke hilir antara lain usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran ikan.

Sasaran “Meningkatnya produksi hasil perikanan” mengandung pengertian bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di kelautan dan perikanan memiliki tugas membantu Bupati dalam mewujudkan pencapaian sasaran daerah “Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah” dan tujuan daerah “Meningkatnya daya saing dan produktivitas sumber daya manusia” serta Misi Bupati “Mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing”.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki masing – masing satu indikator kinerja yang mendeskripsikan ketercapaian tujuan dan sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Tingkat pertumbuhan sektor perikanan merupakan salah satu upaya mencapai ketahanan pangan, menanggulangi kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n dikurangi Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n-1 dibagi Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun n-1 dikali 100 persen	Olah data Dinas Kelautan dan Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan produksi sektor perikanan	1,91 %	Target sebesar 1,91% yang ditetapkan menunjukkan bahwa angka pertumbuhan produksi sektor perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul diharapkan mengalami pertumbuhan sebesar 1,91% dibandingkan dengan angka pertumbuhan di tahun sebelumnya (tahun n-1). Berdasarkan hasil olah data angka pertumbuhan produksi sektor perikanan, persentase pertumbuhan produksi sektor perikanan pada tahun 2024 sebesar 1,88%. Rincian data realisasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		produksi perikanan tangkap dengan total 850,72 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 13.543,30 ton sehingga diperoleh jumlah total 14.394,02 ton. Sedangkan target produksi pada tahun 2024 berdasarkan dokumen perubahan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebesar 13.771 ton dengan rincian target produksi tangkap 833 ton dan target produksi perikanan budidaya 12.878 ton. Trend capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP yaitu pertumbuhan produksi sektor perikanan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah 1,14%, 1,42%, 1,59%, 1,85%, 1,91%, 1,16%. Sedangkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yaitu produksi perikanan sebesar 24,58 juta ton.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.**

NOMOR	:	061/0474.B/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	24 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul

dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi
- Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- Observasi
- Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab		Hermawan Setiaji, SIP, MH
2.	Pembantu Penanggung Jawab		Besari Setyowati, S.E, M.PA
3.	Pengendali Teknis		Tlau Sakti Santosa, S.S, M.Hum
4	Ketua Tim		Sri Handayani, S.Sos, MM
5	Anggota		Wiwik Nuraini, S.E
6	Anggota		Anita Sari, S.H

1.7. Gambaran Umum Dinas Kelautan Dan Perikanan

Data umum Dinas.. sebagai berikut:

Nama Dinas : Dinas Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jl Ringroad Timur Komplek II Perkantoran
Pimpinan Dinas
Nama/NIP : Istriyani, S.PI, MM
NIP : 196802271996022003
Jabatan : Kepala Dinas



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Pendayagunaan potensi local dengan, penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) yakni Pertumbuhan produksi sektor perikanan dan Indikator

Kinerja Kunci sebanyak 1 yakni Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota .

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah 100% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,55%	1,88%	341,82%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 341 % termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil. Pencapaian tertinggi ada pada Persentase produksi perikanan yang diolah yaitu mencapai 188% Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023), maka kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja	Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar target kinerja dapat melebihi

		target dengan : 1) GAPURA SAMUDRA 2) SOHIB (Sentra Olahan Ikan Bantul)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi.	Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar target kinerja dapat melebihi target Bukti dukung : TRAJUMASTRA : Trajumastra (Kemitraan Maju Masyarakat Perikanan Sejahtera)

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan nilai 23,10 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15 %. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23,10	77,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%

1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7,20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	10.50	70.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- b. Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), tetapi masih ada beberapa catatan antara lain:

1. Beberapa sasaran program masih belum sepenuhnya menggambarkan kinerja/ bersifat outcome
2. Seperti temuan SAKIP oleh Kemenpan tahun 2024 untuk menilai tahun 2023 bahwa indikator pada perjanjian kinerja belum relevan dan cukup sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yakni Kalurahan Bahari yang direvitalisasi belum relevan dan cukup sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan dan di tahun 2024 indikator tersebut masih dipergunakan

Dalam DPA Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 terdapat Indikator program sama dengan indikator kegiatan terdapat pada program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat

diusahakan dalam Kabupaten /Kota dengan indikator penurunan jumlah pelanggaran aturan

3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis

Dalam temuan SAKIP oleh Kemenpan tahun 2023 dan 2024 Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun masih ada beberapa target di Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Didalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagian besar target telah ditentukan dengan penyesuaian capaian kinerja tahun 2024. Untuk Target Indikator Kinerja Utama sebesar 1,92%(sudah disesuaikan dengan capaian tahun 2024) tetapi masih ada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan indikator Penurunan jumlah pelanggaran aturan(%) menetapkan target sebesar 5% padahal tahun 2024 realisasi 7,5%

Terdapat perbedaan target dalam DPA Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Kalurahan Bahari yang direvitalisasi dalam DPA perubahan tercantum target sebesar 40% sedangkan di Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 60%

Terdapat indikator yang terbalik antara program dan kegiatan pada perjanjian kinerja perubahan Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tertulis Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator persentase pengembangan kalurahan bahari yang ditetapkan, sedangkan kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya dengan indikator Kalurahan Bahari yang direvitalisasi.

4. Pohon Kinerja tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan belum menampilkan adanya crosscutting tetapi pada tahun 2025 dalam pohon kinerja telah menampilkan adanya crosscutting
- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja, tetapi masih ada beberapa catatan yakni untuk kriteria terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

Temuan SAKIP tahun 2023 untuk SAKIP tahun 2022 dan temuan 2024 untuk SAKIP 2023 oleh Kemenpan terkait indikator dan target belum digunakan untuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan Tahun 2024.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan masih terdapat Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas dengan target yang berbeda dengan target perjanjian kinerja Perubahan Kepala Bidang Perikanan tangkap dan budidaya untuk program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Terdapat beberapa target dalam Renja Perubahan tahun 2024 yang berbeda dengan target yang ada di PK Perubahan :

No	Indikator	Target di Renja Perubahan	PK Perubahan
1	Kalurahan bahari yang direvitalisasi	40%	60%
2	Produksi Perikanan tangkap	835	833
3	Produksi Perikanan Budidaya	12959	12878

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan nilai 21,90 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	21,90	73.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	3,60	60.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	6,30	70.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja, tetapi definisi operasional yang jelas baru terdapat dalam renstra disertai formulasi cara mengukur indikator kinerja tetapi di dalam renja dan Laporan Kinerja tahun 2024 belum tercantum
Di dalam Renstra pertumbuhan sektor perikanan ada formula penghitungannya yakni : $\text{Pertumbuhan produksi sektor perikanan} = \text{Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun ini dikurangi}$

- Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dibagi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dikali 100% tetapi dalam Laporan Kinerja tidak mencantumkan hal tersebut
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang, namun masih terdapat kelemahan karena belum seluruh realisasi kinerja di input pada aplikasi e-sakip
 - 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan nilai 13,05 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13,05	87.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3,60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- 2) Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya, namun Dinas Kelautan dan Perikanan belum menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi DIY maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja perangkat daerah
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan nilai 22,50 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22.50	90.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	11.25	90.00%
-----	---	-------	-------	--------

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 mendapatkan skor 80,55 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23,10	77,00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7,20	80.00%

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1.c	Pemanfaatan	15.00	10.50	70.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	21,90	73.00%
2.a	Keberadaan	6.00	3,60	60.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	6,30	70.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13,05	87.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.70	90.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3,60	80.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.75	90.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22.50	90.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.75	90.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	11.25	90.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	80.55	80,55%

Penilaian tersebut, belum selaras dengan hasil penilaian mandiri (self assesment) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan perikanan. Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9,4% yaitu dari 85,75 menjadi 80,55 pada tahun 2024

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Agar melakukan analisis kembali terhadap indikator kalurahan bahari yang direvitalisasi dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Bappeda Kabupaten Bantul
- 2) Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik
- 3) Menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi DIY maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja pemerintah.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memperoleh nilai dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,90
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,05
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,55

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 80,55 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori penilaian **"A"** dengan interpretasi Memuaskan

3.1.3. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Kelautan dan Perikanan secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik

Tanggal 29 April 2025

Nomor T/700.1.2.1/00725

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197112301996031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦠꦶꦏꦠꦺꦴꦢꦤꦼꦠꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦠꦶꦏꦠꦺꦴꦢ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 387325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/00474/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Besari Setyowati, S.E., M.P.A.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Tlau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	Sri Handayani, S.Sos., M.M.	Ketua Tim	14 HP
5.	Wiwik Nuraini, S.E.	Anggota	14 HP
6.	Anita Sari, S.H.	Anggota	5 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
- Sekretariat DPRD.

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Wibisono

Jl. Ring Road Timur, Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul,
Manding Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55714 Telp: (0274)367509 ext 845 I
Website: dkp.bantul.kab.go.id | E-Mail : dkp@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

Nomor : B/000.8.6.3/00046/SK/2026/Sekre

T E N T A N G : TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengetahui sejauh mana komitmen dalam melaksanakan tindaklanjut rekomendasi AKIP dan untuk terus melakukan perbaikan dalam implementasi SAKIP secara berkelanjutan, perlu ditetapkan tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyusun Laporan tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA** : Laporan tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tahun 2026, merupakan laporan kepada Bupati dan merupakan salah satu bukti dukung dalam implementasi AKIP.

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal : 20 Februari 2026

KEPALA DINAS, *x*


Isriyanti, S.Pi., MM
Kepala Dinas Tingkat I, IV/b
NIP. 196802271996032003

LAMPIRAN 1:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL

Nomor : B/000.8.6.3/00046/SK/2026/Sekre
Tanggal : 20 Februari 2026

T E N T A N G :
TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2026

Rekomendasi 1

- a) Rekomendasi :
Agar melakukan analisis kembali terhadap indikator kalurahan bahari yang direvitalisasi dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Bappeda Kabupaten Bantul.
- b) Tindaklanjut Rekomendasi :
Indikator kalurahan bahari yang direvitalisasi sudah dianalisis dan dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi dan Bappeda Kabupaten Bantul.
- c) Bukti dukung
Hasil analisis dan koordinasi tersebut termuat dalam dokumen perencanaan (RENSTRA 2025-2029, RENJA 2026) dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pada indikator Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yaitu kalurahan bahari yang direvitalisasi menjadi Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi.

Rekomendasi 2 :

- a) Rekomendasi :
Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik
- b) Tindaklanjut Rekomendasi :
Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan penyempurnaan kualitas penetapan target kinerja.
- c) Bukti dukung
Pada program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, indikator pada RENSTRA perubahan Tahun 2021-2026 adalah



tercapainya penurunan jumlah pelanggaran aturan, formulasi ini bersifat invert di mana capaian pelanggaran semakin kecil maka semakin baik. Sementara itu Inspektorat menghendaki konsistensi formulasi kualitas penetapan target kinerja. Oleh karena itu pada RENSTRA Tahun 2025-2029 indikator program tersebut berubah menjadi Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Hal ini selaras dengan penyempurnaan kualitas penetapan target kinerja. Bukti dokumen berada pada RENSTRA Tahun 2025-2029.

Rekomendasi 3

a) Rekomendasi :

Menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat Regional Provinsi DIY maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja pemerintah.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat Regional Provinsi DIY maupun secara nasional

c) Bukti dukung

Dokumen yang menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat Regional Provinsi DIY maupun secara nasional terdapat pada LKJ (Laporan Kinerja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal : 20 Februari 2026

KEPALA DINAS, 



Istriyani, S.Pi., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196802271996032003

